	Nomor SOP					
and another Union	Tanggal Pembuatan	22 November 2019				
	Tanggal Revisi	3 Mei 2021				
	Tanggal Efektif	4 Mei 2021				
The second secon		Plt. Kepala Biro Hukum				
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIRO HUKUM	Disahkan oleh	Arman Jauhari, SH 197507092002121003				
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI	Nama SOP	Pembuatan Peraturan Gubernur				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1 UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara	1 Staf yang telah meng	ikuti diklat Legal Drafting				
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2 Memahami Pembenti	ukan Produk Hukum Daerah				
3, UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	3 Memahami Penyusunan Legal Drafting					
Perundang-Undangan	4 Menguasai Komputer					
4 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	5 Pendidikan minimal S	51				
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGK	KAPAN				
1 sop skpd/ Unit Kerja	1 Draft Peraturan Daers	ah 5 Buku Ekspedisi				
	2 Alat Tulis Kantor (ATI	2000 Control C				
	3 Komputer / Laptop da					
	Jaringan internet					
	4 Printer					
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PEN	IDATAAN				
1 Harus sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku						
2 Harus tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana						
	1					

SOP PEMBUATAN PERATURAN GUBERNUR

Г	SOP PEMBUATAN PERATURAN GUBERNUR	R Pelaksana							٨	\Box				
No	Aktivitas	SKPD	Staf Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Kabbag Peraturan Perundang- Undangan Provinsi	Kepala Biro Hukum	Asisten	Sekda	Gubernur	Kemendagri	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keteranga n
1	2	3	4	5			6				9	10	11	12
1	Usulan Pergub dari SKPD	Mulai									Draft Pergub		Tanda terima	
2	Melakukan Registrasi Koreksi		2								Draft Pergub	5 menit	Lembar Disposisi	
3	Mendisposisi Draft Pergub untuk di Koreksi					3					Lembar Disposisi	1 jam	Memo Instruksi	
4	Mengkoreksi legal drafting dan melakukan harmonisasi yang dilakukan secara berjenjang dari pelaksana dan Kasubbag Perkada		4	→ 5 -							Draft Pergub	32 Jam	Draft Pergub	
5	Memeriksa dan Pengkajian Kembali hasil Draft Pergub yang telah dikoreksi										Draft Pergub	2 Jam	Draft Pergub	
6	Rapat Koordinasi antar SKPD terkait dengan Asisten dan Biro Hukum	7					9				Draft Pergub	8 Jam	Draft Pergub	
7	Perbaikan Naskah setelah rapat koordinasi		8								Draft Pergub	8 Jam	Draft Pergub	
8	Sosialisasi Pembahasan Ranpergub	9 4				10	1 1				Draft Pergub	8 Jam	Draft Pergub	
9	Penyampaian Draft Pergub untuk mendapatkan hasil fasilitasi dari Kemendagri						12				Draft Pergub	8 Jam	Draft Pergub	
10	Fasilitasi dari Kemendagri									13	Draft Pergub	120 Jam	Penyempurnaan Draft Pergub	
11	Perbaikan setelah hasil fasilitasi Kemendagri		14								Hasil Evaluasi Kemendagri	8 Jam	Penyempurnaan Ranperda	
12	Paraf Koordinasi Draft Pergub	15				16	17	18			Draft Pergub	32 Jam	Draft Pergub	
13	Penetapan Pergub oleh Gubernur								19		Draft Pergub	16 Jam	Pergub	
14	Pengundangan Pergub dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah							20			Pergub	8 jam	Pergub	
15	Penomeran dan Salinan Pergub		21								Pergub	30 Menit	Pergub	
16	Penyerahan Perda pada instansi Pelaksana	Selesai									Pergub	8 Jam	Pergub	